BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendekatan pembangunan yang lebih menonjolkan pertumbuhan ekonomi secara cepat telah mendorong percepatan urbanisasi. Percepatan urbanisasi dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu terserapnya sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang dimiliki pedesaan oleh kawasan perkotaan. Proses urbanisasi yang tidak terkendali, juga semakin mendesak produktivitas pertanian karena peningakatan konservasi lahan kawasan pertanian menjadi kawasan perkotaan. Konsekuensi logis dari kondisi ini adalah semakin menyempitnya lapangan pekerjaan di bidang pertanian, sehingga semakin mendorong terjadinya migrasi penduduk pedesaan ke perkotaan. Kondisi ini mengakibatkan Indonesia harus mengimpor produk-produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. **(Rahman, 2007:126)**

Kawasan agropolitan tidak ditentukan oleh batasan administrasi pemerintah, tetapi lebih ditentukan oleh *economic of scale* dan *economic of scope*. Untuk itu penetapan kawasan agropolitan dirancang secara lokal dengan memperhatikan realita perkembangan agribisnis yang ada di setiap daerah. Pada akhirnya tujuan utama yang diraih dari kebijakan pengembangan kawasan agropolitan yaitu sebagai salah satu alternatif konsep pembangunan kawasan yang mampu mendorong perekonomian daerah, menciptakan sinergitas pembangunan antar

wilayah yang lebih berimbang, mampu mengatasi permasalahan pembangunan wilayah pedesaan serta meningkatkan pengelolaan pertanian berkelanjutan. **(Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2011)**

Menjawab berbagai tantangan dalam pembangunan pertanian yang sejalan dengan upaya percepatan pembangunan khususnya daerah perdesaan, diperlukan komitmen yang kuat dan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat maupun swasta. Pada pedoman umum Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur **(Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2011)**, ide Agropolitan dipandang mampu menjawab tantangan pemerataan pembangunan dan pembangunan berkelanjutan yang merupakan yang merupakan salah satu pendekatan pembangunan pedesaan berbasis pertanian dalam artian luas dengan menempatkan "kota-tani" sebagai pusat kawasan dengan segala ketersediaan sumber dayanya, sebagai modal tumbuh dan berkembangnya kegiatan saling melayani dan mendorong usaha agrobisnis antar desa-desa kawasan dan desa-desa sekitarnya.

Akibat dari kurang maksimalnya perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian adalah munculnya berbagai permasalahan pembangunan pertanian, diantaranya adalah masih tingginya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian, kepemilikan lahan pertanian yang relatif semakin menyempit, minimnya infrastruktur pedesaan, rendahnya daya saing produk dan rendahnya daya saing produk dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pedesaan. Hal tersebut diatas merupakan refleksi permasalahan perekonomian di pedesaan. Oleh karena itu diperlukan strategi membangkitkan pembangunan ekonomi yang

mampu memberikan kehidupan lebih baik bagi mayoritas penduduk di pedesaan yang hidup di sektor pertanian. Selain itu dalam mempercepat pembangunan perdesaan dan pertanian diperlukan komitmen dan tanggung jawab moral pembangunan dari segenap aparatur pemerintah, masyarakat maupun swasta sehingga pembangunan pertanian dapat dilakukan secara efektif, efisien, terintegrasi dan sinkron dengan pembangunan sektor lainnya serta berwawasan lingkungan. Model pembangunan ini bisa dilakukan dengan konsep pengembangan agropolitan. **(Pranoto, 2005:46)**

Terwujudnya sistem usaha agribisnis antara perkotaan dan pedesaan bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Sasaran pengembangan kawasan agropolitan adalah pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis, pengembangan komoditas unggulan pertanian, pengembangan kelembagaan petani dan penyedia jasa pertanian, pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha tani dan investasi, serta pengembangan sarana dan prasarana penunjang. Dalam pengembangan kawasan agropolitan, masyarakat bertindak sebagai pelaku sedangkan aparatur pemerintah bertindak sebagai fasilitator. **(Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2011).**

Pengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu terdapat pada beberapa kawasan pertanian yang kondisi fisik, sosial budaya dan ekonominya cenderung kuat mengarah ke kegiatan pertanian. Keberadaan gunung, hutan, dan hamparan pertanian yang mendominasi ke ruangan Kota Batu, sangat sesuai untuk pengembangan wisata alam terkait dengan potensi yang ada di gunung, hutan, dan kawasan pertaniannya. Selain itu sebagai kota yang dikenal dengan komoditas

apelnya, pemandangan alam, air terjun, sumber air panas, agrowisata, wisata petualangan, pemanfaatan pekarangan rumah penduduk yang sebagian besar digunakan untuk tanaman bunga, apel, apotik hidup, dan lain sebagainya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri dari segi wisata dan lingkungan hidup disamping nilai ekonomis.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. **(Arsyad, 2002:108).**

Sehubungan dengan keinginan untuk mewujudkan pembangunan seperti apa yang diharapkan, ada dua kondisi yang perlu diperhatikan karena dapat berpengaruh terhadap proses perencanaan pembangunan daerah, yaitu: (1) tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan perekonomiannya; (2) kenyataannya bahwa perekonomian daaerah dalam suatu negara dipengaruhi oleh setiap sektor secsra berbeda-beda, misalkan beberapa daerah mengalami pertumbuhan pada sektor industrinya sedangkan daerah lain mengalami penurunan. Istilah yang menjelaskan perbedaan perspektif masyarakat daerah mengenai arah dan makna pembangunan daerah. **(Kuncoro, 2006 : 47).**

Secara umum dapat dikatakan bahwa regionalisasi kegiatan ekonomi berhubungan erat dengan pola perkembangan, jenis ekonomi dan perubahan peranan berbagai kegiatan ekonomi itu dalam keseluruhan kegiatan ekonomi.

Berkaitan hal tersebut, maka analisis perkembangan pembangunan suatu daerah, semakin kecil suatu wilayah akan semakin mudah dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan dan sumber-sumber potensialnya, sehingga akan memudahkan dalam penyusunan rencana secara komprehensif dan semakin mudah untuk menetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Ada tujuh belas sektor ekonomi atau kelompok lapangan usaha yang umumnya dapat dihitung dalam PDB atau PDRB jika dalam lingkup regional/daerah. Adapun tujuh belas sektor tersebut yaitu:

1. Sektor Pertanian
2. Sektor Pertambangan dan penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan listrik dan gas
5. Pengadaan air
6. Konstruksi
7. Perdagangan, hotel, dan restauran
8. Transportasi dan pergudangan
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum
10. Informasi dan komunikasi
11. Jasa Keuangan
12. *Real Estate*
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi pemerintah dan pertahanan
15. Jasa Pendidikan

16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
17. Jasa Lainnya **(Anonim, 2004 : 12)**

Dari perhitungan sektor – sektor tersebut, kondisi struktur ekonomi dari suatu daerah atau negara dapat ditentukan. Suatu daerah dikatakan agararis bila peran sektor pertanian sangat dominan dalam PDRB nya, demikian pula sebaliknya dikatakan sebagai daerah industri bila yang lebih dominan adalah sektor industrinya.

Melalui pengembangan agropolitan, diharapkan terjadi interaksi yang kuat antara pusat kawasan agropolitan dengan wilayah produksi pertanian dalam sistem kawasan agropolitan. Melalui pendekatan ini, produk pertanian dari kawasan produksi akan diolah terlebih dahulu di pusat kawasan agropolitan sebelum dijual ke pasar yang lebih luas sehingga nilai tambah tetap berada di kawasan agropolitan. Pada akhirnya, konsep gerakan agropolitan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif konsep pembangunan kawasan yang mampu mendorong perekonomian daerah pada tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi; menciptakan sinergitas pembangunan antar wilayah yang lebih berimbang; mengatasi masalah-masalah pembangunan wilayah pedesaan dan meningkatkan pengelolaan pertanian berkelanjutan.

Dalam penelitian ini penulis memilih salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Batu sebagai objek penelitian. Penelitian ini mengidentifikasi tentang potensi wilayah dalam pengembangan agropolitan di Kota Batu.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan mengidentifikasi lebih lanjut tentang **"ANALISIS POTENSI WILAYAH DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DI KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR MELALUI PENDEKATAN LOCATION QUOTIENT, SHIFT SHARE, SWOT".**

1.2 Rumusan Masalah

1. Sektor lapangan usaha apa yang termasuk kedalam sektor basis dan non basis di Kota Batu?
2. Apakah ada potensi wilayah Kota Batu Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan kawasan agropolitan?
3. Apakah ada strategi pengembangan kawasan agropolitan Kota Batu Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sektor lapangan usaha apa yang termasuk kedalam basis dan non basis yang ada di Kota Batu Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui potensi wilayah di Kota Batu Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan kawasan agropolitan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat secara teoritis dan praktis tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan secara topik penelitian, serta sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
2. Bagi pembaca, sebagai bahan wacana dan kajian untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, terutama dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kota Batu Provinsi Jawa Timur.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Batu, sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kota Batu Provinsi Jawa Timur.
2. Bagi pelaku usaha Agropolitan, memberikan masukan-masukan ataupun sebagai pertimbangan dalam melanjutkan program yang

diberikan oleh pemerintah agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Investor, sebagai bahan pertimbangan dalam menanamkan modalnya khususnya pada sektor ekonomi di Kota Batu Provinsi Jawa Timur.